

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya kecurangan adalah sebuah usaha memanfaatkan hak orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan pribadi. Di Indonesia sampai saat ini banyak kasus kecurangan secara berulang-ulang terus terjadi. Dapat dilihat dari adanya kebijakan atau langkah yang menyembunyikan atau menghilangkan informasi sebenarnya. Tidak sedikit di Indonesia terungkap kasus kecurangan akuntansi seperti, manipulasi pajak, kasus perbankan, serta yang baru ini terjadi yaitu korupsi yang melibatkan komisi penyelenggara pemilu.

Menurut Amin Wijdjaja, (2013) dalam Nafi, (2015), kecurangan internal dan eksternal adalah tipe kecurangan yang sering terjadi di perusahaan atau instansi. Perilaku yang tidak legal dari eksekutif, manajer, dan karyawan terhadap instansi atau perusahaan merupakan kecurangan internal sedangkan kecurangan yang dilakukan pihak luar kepada instansi atau perusahaan adalah kecurangan eksternal.

Lembaga keuangan desa yang terdapat di Bali memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan desa adat yang dibentuk serta dikelola oleh kesatuan masyarakat adat di Bali disebut LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Mendorong pembangunan perekonomian pada masyarakat melalui pemberian kredit dan simpanan dalam bentuk tabungan merupakan tujuan dari LPD. LPD bagi masyarakat di Bali memiliki peranan yang sangat penting, maka diharuskan pengelola serta pengurus

LPD agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yaitu dengan meningkatkan produktivitasnya (Wijayanti, 2012). Dilansir dari situs balitribune.co.id, berita yang dimuat dalam harian bali tribune pada 29 April 2019 yaitu:

“di Bali Lembaga Perkreditan Desa (LPD) cukup pesat mengalami perkembangan. Ini dibuktikan pada tahun 1984 lalu di 9 kabupaten/kota di Bali terdapat 8 LPD dan hingga 2016 tercatat terdapat 1.443 LPD.” (Pansus LPD DPRD Provinsi Bali, 2016)

Table 1.1
Data LPD di 9 Kabupaten/Kota di Bali

No	Kabupaten	Bangkrut	Tidak Sehat	Sehat
1	Tabanan	54	8	188
2	Gianyar	31	15	142
3	Buleleng	25	6	118
4	Karangasem	24	2	107
5	Bangli	8	2	99
6	Klungkung	8	1	86
7	Badung	4	4	79
8	Jembrana	1	0	60
9	Denpasar	0	0	30
	Jumlah	155	38	909

Sumber: Data Pansus LPD DPRD Provinsi Bali (2016)

Namun tidak sedikit terdapat LPD yang bermasalah ditengah pertumbuhan LPD yang sangat pesat. Dari data yang dijabarkan pada tabel diatas, tercatat sebanyak 155 LPD di Bali sudah tidak beroperasi lagi dan dinyatakan bangkrut. Menariknya tidak hanya LPD mengalami kebangkrutan saja, tercatat 38 LPD yang masuk dalam kategori tidak sehat dan 909 LPD dinyatakan dalam kategori sehat.

LPD di Buleleng juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat yakni dengan terdapatnya 168 LPD yang tersebar di setiap wilayahnya. Dibalik pesatnya pertumbuhan dan perkembangan LPD di kabupaten Buleleng, dibayangi juga oleh maraknya LPD yang bermasalah.

Table 1.2
Data LPD di Kabupaten Buleleng

No	Kategori	Jumlah LPD
1	Macet	22
2	Tidak Sehat	5
3	Kurang Sehat	16
4	Cukup Sehat	26
5	Sehat	99
Total		168

Sumber: Data Bagian Ekonomi Pembangunan Pemkab Buleleng (2018)

Dari ratusan LPD yang terdapat di Buleleng tersebut kemudian ditetapkan dalam kategori macet 22 LPD, tidak sehat 5 LPD, kurang sehat 16 LPD, cukup sehat 26 LPD dan sehat sejumlah 99 LPD. Khusus dalam kategori yang dinyatakan macet yaitu LPD tidak mampu menjalankan usaha. Upaya untuk membangkitkan kembali tidak bisa dilakukan karena rumitnya persoalan yang dialami oleh LPD. Dilansir dari situs balipost.com yang dimuat dalam portal berita pada 9 November 2018, Kabag Ekbang Pemkab Buleleng mengungkapkan bahwa:

“lemahnya manajemen usaha, permodalan, hingga konflik internal pengurus LPD bersangkutan adalah penyebab LPD mengalami kemacetan. Semenjak ditemukannya kemacetan yang dialami LPD itu, pemerintah sudah melakukan pembinaan dan berkoordinasi dengan BPD Bali bersama BKS-LPD, LP-LPD. Namun upaya yang dilakukan itu gagal, LPD yang mengalami kemacetan tersebut dibiarkan begitu saja sehingga sampai sekarang. Tak heran kalau hanya tinggal kantor dan izin yang masih tercatat di Pemprov Bali”. (Desak Putu Rupadi, 2018)

Di kabupaten Buleleng terdapat salah satu kecamatan yaitu kecamatan Seririt. Dari observasi awal peneliti, kecamatan ini memiliki 21 desa/kelurahan dengan luas wilayah 11,178 Km². Seririt juga memiliki LPD yang tersebar di seluruh wilayahnya. Dari 21 desa/kelurahan, di Seririt terdapat 25 LPD yang tersebar dimasing-masing wilayahnya.

Table 1.3
Jumlah LPD di Kecamatan Seririt

No	LPD	No	LPD	No	LPD
1	Kalianget	10	Mayong	19	Umeanyar
2	Joanyar Kelodan	11	Bestala	20	Kalanganyar
3	Joanyar Kajanan	12	Munduk Bestala	21	Tegalenga
4	Tangguwisia	13	Gunung sari	22	Banjar Asem
5	Sulanyah	14	Pengastulan	23	Kalisada
6	Seririt	15	Patemon	24	Pangkung Paruk
7	Bubunan	16	Lokapaksa	25	Yeh Anakan
8	Ringdikit	17	Ularan		
9	Rangdu	18	Unggahan		

Sumber: Data Peneliti (2020)

Dari perbandingan jumlah desa/kelurahan dengan jumlah LPD di Seririt, dapat disimpulkan bahwa LPD di Seririt juga berkembang dengan baik. Namun dalam perkembangannya tidak lepas juga dari masalah yang menyebabkan LPD mengalami kerugian yang cukup material. Terdapat 4 kasus besar yang mengakibatkan 2 LPD dinyatakan bangkrut dan tidak beroperasi lagi yaitu LPD Joanyar Kajanan dan LPD Kalianget serta 2 LPD kasusnya sampai saat masih dalam proses penyidikan dari pihak kepolisian dan kejaksaan negeri Singaraja yaitu LPD Unggahan dan LPD Pengastulan karena kasus penggelapan dana nasabah. Munculnya kesenjangan tersebut diindikasikan karena terjadi asimetri informasi antara pengelola dengan pemangku kepentingan, rendahnya kecerdasan spiritual, tidak mematuhi ketaatan aturan akuntansi dan rendahnya integritas dari para *prajuru* LPD.

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa yang mempunyai akses informasi atas prosep perusahaan/instansi yang tidak dimiliki oleh pihak luar adalah manajer dan teori agen serta prinsipal merupakan orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya disebut asimetri informasi. Selaras dengan fenomena

yang terjadi, kesenjangan tersebut baru diketahui saat ini padahal kesenjangan sudah terjadi beberapa tahun kebelakang. Dikuatkan juga dengan hasil penelitian oleh Prawira (2014) bahwa asimetri informasi berpengaruh besar terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Kemampuan yang dimiliki oleh manusia dalam memahami nilai yang terkandung dari setiap perbuatan yang dilakukan dan memaknai sebuah arti dalam kehidupan serta kemampuan potensial yang dimiliki setiap manusia dan menjadikan seseorang untuk menyadari cinta terhadap kekuatan yang besar dan sesama makhluk hidup karena sebagai bagian keseluruhan dan makna, nilai, moral, sehingga untuk lebih positif dengan kebijaksanaan dapat menjadikan manusia untuk dapat memposisikan diri, kedamaian dan kebahagiaan yang sebenarnya disebut kecerdasan spiritual. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Melisa (2017) menyatakan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selain itu, penyebab terjadi kecurangan adalah tidak taatnya dalam aturan akuntansi yang juga disebabkan oleh rendahnya integritas prajuru dalam menyusun laporan keuangan. Mencegah kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi yaitu dengan meningkatkan ketaatan aturan akuntansi pada perusahaan atau instansi dapat serta diimbangi dengan integritas tinggi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ada di lingkungan instansi atau perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adelin (2013) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan penelitian Lestari (2017) menyatakan bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini sudah dapat diteliti sebelumnya, namun terdapat perbedaan hasil dari beberapa variabel. Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Asimetri Informasi, Kecerdasan Spiritual, Ketaatan Aturan Akuntansi, Integritas *Prajuru* dan Pengaruhnya Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas temuan beberapa masalah baik itu berupa adanya *research gappada* penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dan fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu:

1. Terjadinya beberapa kasus LPD yang melibatkan *prajuru* LPD.
2. Terdapat perbedaan hasil penelitian variabel asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Terdapat perbedaan hasil penelitian variabel kecerdasan spiritual terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4. Terdapat perbedaan hasil penelitian variabel ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
5. Terdapat perbedaan hasil penelitian variabel ketaatan integritas kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini pembatasan masalah sangat dibutuhkan guna membuat fokus penelitian menjadi lebih jelas berdasarkan penggunaan variabel-variabel penelitian. Penelitian ini berfokus untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel asimetri informasi, kecerdasan spiritual, ketaatan aturan akuntansi, dan integritas *prajuru* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, adapun masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di kecamatan Seririt?
2. Bagaimanakah pengaruh kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di kecamatan Seririt?
3. Bagaimanakah pengaruh ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di kecamatan Seririt?
4. Bagaimanakah pengaruh integritas *prajuru* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di kecamatan Seririt?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di kecamatan Seririt.
2. Untuk menganalisis kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di kecamatan Seririt.
3. Untuk menganalisis ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di kecamatan Seririt.
4. Untuk menganalisis integritas *prajuru* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di kecamatan Seririt.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan juga diharapkan mampu menjadi sumber informasi tambahan yang berkaitan dengan asimetri informasi, kecerdasan spiritual, ketaatan aturan akuntansi, dan integritas *prajuru* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan dan referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah dan juga menambah pengetahuan mengenai penyebab dari kecenderungan kecurangan akuntansi.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi khususnya dalam kecenderungan kecurangan akuntansi dan diharapkan ada penelitian lebih dalam tentang topik ini di Universitas Pendidikan Ganesha.

c. Bagi LPD

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk para *prajuru* LPD dalam mencegah kecenderungan kecurangan akuntansi.

